BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya di Indonesia adalah masalah perekonomian. Dengan sempitnya lapangan pekerjaan, masyarakat sulit untuk memecahkannya. Salah satu upaya untuk mengurangi masalah ekonomi tersebut, dengan membuat usaha kecil-kecilan atau usaha mikro. Setiap individu maupun badan usaha mempunyai kebutuhan yang banyak, baik untuk memenuhi kebutuhan usahanya.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut memerlukan dana yang cukup agar dapat tercapai kebutuhan yang diinginkan. Namun, sering sekali individu atau badan usaha kekurangan dana untuk menjalankan usahanya, apalagi individu yang baru merintis usahanya dan memerlukan dana yang cukup besar.

Keberadaan pengusaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia, jumlah usaha disektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) mencapai lebih dari 90 % dari total unit usaha, kontribusinya dalam pembentukan PDB (Produk Domistik Bruto) mencapai lebih dari 53 %.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam

mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Meskipun UMKM telah menunjukkan perannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan iklim usaha, baik yang bersifat internal maupun eksternal, contohnya produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan UMKM, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kebijakan yang ada belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan UMKM.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 7 ayat 1 menyatakan "Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan dan perundang-undangan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana dll". Sementra pasal 2 menyatakan "Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha".

Dari Undang-Undang tersebut jelas menyatakan bahwa dunia usaha seperti bank, harus berperan aktif dalam pengembangan UMKM dalam hal ini dari segi pemodalan dengan penyaluran kredit kepada pelaku UMKM.

Potensinya yang besar, telah mampu membantu proses penyerapan tenaga kerja, setidaknya mampu mengurangi masalah pengangguran nasional. Posisi seperti itu menempatkan peran pengusaha mikro kecil dan menengah serta koperasi sebagai jalur utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.

Dalam propenas 2000-2004 disebutkan bahwa pengembangan pengusaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam dimensi pengembangan nasional yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan antar pelaku ataupun penyerapan tenaga kerja (O. P. Simorangkir, 1991;133).

Lebih daripada itu pengembangan pengusaha mikro kecil dan menengah serta koperasi mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural yaitu dengan meningkatnya perokonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.

Pengembangan pengusaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi diperlukan adanya lembaga yang mendukungnya salah satunya adalah perbankan. Perbankan mempunyai peranan menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Dalam Undang – Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam menjalankan fungsi intermediasi sering kali terjadi keadaan yang tidak optimal dalam artian debitur mengeluh sulitnya mengakses kredit dan sebaliknya bank mengeluh sulitnya menyalurkan kredit, ketidak optimalan pemberian kredit memunculkan informasi yang tidak simetris, biaya transaksi dan timbulnya risiko bank.

Dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredittersebut bukan dana milik bank itu sendiri, tetapi merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada bank, yang kemudian diputarkan kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (A. Budi Santoso & Sri Susilo Triondani, 2006;30).

Pemerintah telah cukup lama menggulirkan kebijakan kredit usaha mikro dalamrangka penanggulangan kemiskinan yang telah lama menggerogoti sebagian besar rakyat Indonesia. Ada satu hal yang menarik untuk dicermati terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut. Yaitu upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dikaitkan dengan pengembangan usaha mikro.

Kredit mikro adalah pinjaman dalam jumlah kecil untuk orang miskin dengan tujuan mereka bisa berwirausaha. Kredit mikro ditujukan untuk orang-orang yang tidak memiliki jaminan, pekerjaan tetap, dan riwayat kredit yang terpercaya, serta tidak mampu untuk memperoleh kredit biasa. Kredit mikro merupakan bagian dari keuangan mikro, suatu layanan keuangan untuk membantu orang-orang miskin.

Kredit mikro adalah suatu inovasi finansial yang dimulai oleh Grameen Bank di Bangladesh. Di negara tersebut, kredit mikro telah berhasil membuat

banyak orang mampu untuk memberdayakan diri dan memperoleh penghasilan. Perserikatan Bangsa-bangsa menyatakan tahun 2005 sebagai Tahun Kredit Mikro Internasional.

Dasar pemikiran yang berkembang adalah adanya pengelompokan umur dalam kerangka penanggulangan kemiskinan. Bahwa di dalam mendorong laju perkembangan usaha sektor UMKM sertasejalan dengan rencana bisnis Bank BJB KCP Cijerah Bandung Bandung dalam upaya percepatan peningkatan kredit produktif terutama dalam skala mikro dan kecil, maka Bank BJB KCP Cijerah Bandung telah meluncurkan kredit mikro utama yang ditunjukan bagi para pelaku UMKM.

Pengenaan tingkat suku bunga kredit mikro utama yang lebih tinggidibandingkan dengan tingkat suku bunga kredit lainnya, sehingga apabila peluang *market share* kredit skala mikro dan kecil dapat dimanfaatkan dan dikelola secara baik, maka akan memberikan margin yang cukup tinggi.

Sejalan dengan rencana implementasi pengelolaan kredit mikro utama melaluiunit bisnis yang merupakan wujud dalam meningkatkan akselerasi pertumbuhan penyaluran kredit mikro utama dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian selain selalu satu misi fungsi Bank BJB KCP Cijerah Bandung sebagai penggerak laju perekonomian.

Menurut manajer Perkreditan Bank BJB KCP Cijerah Bandung setelah survey yg dilakukan oleh Bank BJB KCP Cijerah Bandung fenomena yang terjadi ternyata banyak nasabah yang mengajukan permohonan kredit mikro utama di Bank BJB KCP Cijerah Bandung daripada bank lain karena beberapa alasan yaitu

yang pertama persyaratan administrasi sangat mudah, yang kedua jangka waktu pengembalian untuk kredit mikro utama cukup lama yaitu 3 tahun, yang ketiga biaya provisi hanya 0.5% dari *plafond* kredit, dan yang keempat yaitu agunan yang harus diberikan termasuk relatif kecil.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil suatu judul dalam Laporan Kerja Praktik adalah :

"Tinjauan atas Prosedur Pemberian Kredit Mikro Utama pada Bank BJB KCP Cijerah Bandung".

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui data pemberian kredit yang terdapat didalam Bank BJB KCP Cijerah Bandung, sehingga dikemukakan permasalahan yang sebenarnya.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Prosedur Pemberian Kredit Mikro Utama pada Bank BJB KCP Cijerah Bandung.
2. Untuk mengetahui bagian yang terkait dalam Pemberian Kredit Mikro Utama pada Bank BJB KCP Cijerah Bandung.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi dalam Proses Pemberian Kredit Mikro Utama pada Bank BJB KCP Cijerah Bandung.

1.3 Kegunaan Penelitian Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi perusahaan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran mengenai prosedur pemberian Kredit Mikro Utama (KMU) pada Bank BJB KCP Cijerah Bandung.

2. Bagi pihak lain

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai penentuan pelaksanaan kredit mikro di Bank BJB KCP Cijerah Bandung.

1.3.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan dibidang kredit khususnya mengenai prosedur pemberian Kredit Mikro Utama (KMU) pada Bank BJB KCP Cijerah Bandung, sehingga akan memberi wawasan yang lebih luas tentang masalah penentuan pemberian kredit mikro dan dapat diperoleh gambaran mengenai kesesuaian fakta lapangan atas permasalahan pemberian kredit.

2. Bagi rekan-rekan mahasiswa

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode kerja praktek yang dilaksanakan penulis dalam penulisan laporan kerja praktek pada Bank BJB KCP Cijerah Bandung ini adalah *block release* yaitu metode pelaksanaan kerja praktek dalam satu periode tertentu.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini adalah :

1. Studi Lapangan

   Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke tempat yang menjadi lokasi kerja praktek untuk memperoleh informasi tentang perumusan yang dibahas pada Bank BJB KCP Cijerah Bandung, yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

   a) Observasi

      Penulis melakukan pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap segala kegiatan perusahaan dan mencatat atau mengambil informasi yang dapat mendukung, seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi dan lain sebagainya.

   b) Wawancara

      Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung pada pihak yang bersangkutan sesuai dengan masalah yang akan dibahas.

   c) Internet

      Dimana penulis melakukan internet *browsing* guna menambah kelengkapan data-data yang diperlukan.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik mendapatkan data secara teoritis dengan cara menelaah dan membandingkan beberapa sumber keperpustakaan, seperti buku-buku perpustakaan dan bahan lain yang berhubungan dengan masalah yang diberikan, metode ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Dengan melakukan studi pustaka ini penulis dapat yakin sehingga dapat menguatkan isi dari hasil penelitian.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek Lapangan

Dalam Penyusunan Laporan Kerja Praktek ini, penulis mengadakan kerja praktek pada Bank BJB KCP Cijerah Bandung yang beralamat di Jl. Cijerah No. 216 A, Kota Cimahi.

Kerja praktek dilaksanakan selama 2 minggu, mulai dari tanggal 22 Juli2013 s.d tanggal 6 Agustus 2013. Waktu pelaksanaan tiap hari Senin – Jum’at, pada jam kerja yaitu 08.00 WIB – 16.00 WIB.

Tabel 1.1
Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

No	KEGIATAN	BULAN					
		JUL 2013	AGT 2013	SEP 2013	OKT 2013	NOV 2013	DES 2013
1.	PERSIAPAN KERJA PRAKTEK						
	Permohonan surat kerja praktek						
	Pengajuan kerja praktek ke instansi						
	Persetujuan kerja praktek						
2.	PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK						
	Registrasi						
	Aktivitas kerja praktek						
3.	PELAPORAN KERJA PRAKTEK						
	Pengajuan judul						
	Bimbingan dengan dosen pembimbing						
	Revisi						
	Pengumpulan data						
	Ujian kerja praktek						
	Pengumpulan kerja praktek						